SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, TELP. (021) 3843348, 3810350, 3457661 FAX. (021) 3453553, 3454546
TROMOL POS NO. 1020 - JAKARTA 10010

Nomor : 1313 /SEK/KU.00/10/2018 19 Oktober 2018
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Set
Hal : Pemberitahuan Pemeriksaan dan Permintaan Dokumen Awal

Yth.
1. Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
2. Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
3. Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI
5. Sekretaris Direktorat Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI
6. Sekretaris Direktorat Badan Peradilan Militer dan TUN Mahkamah Agung RI
7. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI
8. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding (Sampling pemeriksaan terlampir)
9. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama (Sampling pemeriksaan terlampir)

Berkaitan dengan Surat Tugas Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor : 93/ST/I-IV/108/2018 tanggal 12 Oktober 2018 untuk melaksanakan pemeriksaan atas Penilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2017-2018 pada Mahkamah Agung di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan dan Surat Penanggung Jawab Badan Pemeriksa Keuangan Nomor : 176/S/XVI/10/2018 tanggal 15 Oktober 2018 hal pemberitahuan pemeriksaan, serta Surat Ketua Tim Badan Pemeriksa Keuangan Nomor : 01/REVAL-MA/10/2018 tanggal 17 Oktober 2018 hal permintaan dokumen awal, dengan ini diminta Saudara untuk menyediakan dan memenuhi permintaan dokumen yang dibutuhkan untuk kelancaran pemeriksaan tersebut.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Mahkamah Agung.

Sekretaris
Mahkamah Agung Republik Indonesia

A.S. PUDJOHARSOYO

Tembusan :
1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
3. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
4. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
5. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
6. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
AUDITORAT KEUANGAN NEGARA III
Jl. Gatot Subroto Nomor 31 Telp. 021-25549000 Ext. 3562 Fax. (021) 5700501 Jakarta Pusat 10210

Jakarta, 15 Oktober 2018

Nomor : 176 /S/XVI/10/2018
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pemberitahuan Pemeriksaan

Yth. Sekretaris Mahkamah Agung
di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13
Jakarta 10110

Sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan atas Penilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2017-2018 pada Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang, Kementerian/Lembaga selaku Pengguna Barang, dan Instansi terkait lainnya di Jakarta dan daerah sesuai Surat Tugas No. 93/ST/I-IV/10/2018 tanggal 12 Oktober 2018 (terlampir), kami akan melaksanakan pemeriksaan mulai tanggal 18 Oktober 2018. *Entry meeting* gabungan atas pemeriksaan ini akan dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2018, namun akan didahului dengan *entry meeting* teknis di Mahkamah Agung pada tanggal 17 Oktober 2018.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Penanggung Jawab,

Dr. Blucer Welington Rajagukguk
NIP 196810201989031008

Tembusan Yth.:
1. Ketua MA
2. Anggota III BPK
3. Kepala Badan Pengawasan MA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT TUGAS
Nomor : 93 /ST/I-IV/10/2018

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia memberi tugas kepada pemeriksa sebagaimana lampiran 1 s.d. 38 untuk melaksanakan pemeriksaan atas Penilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2017-2018 pada Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang, Kementerian/Lembaga selaku Pengguna Barang, dan Instansi terkait lainnya di Jakarta dan daerah selama 55 hari.

Jakarta, 12 Oktober 2018

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Ketua

MOERMAHADI SOERJA DJANEGARA

Tembusan Yth.
1. Presiden RI;
2. Wakil Presiden RI;
3. Wakil Ketua BPK RI;
4. Para Anggota BPK RI;
5. Menteri Keuangan RI;
6. Para Menteri Kabinet Kerja RI;
7. Para Pimpinan Lembaga;
8. Sekretaris Jenderal BPK RI;
9. Tortama Keuangan Negara II BPK RI;
10. Inspektur Utama BPK RI; dan
11. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI.

Lampiran 13 ST Nomor : 93 /ST/I-IV/10/2018

Pemeriksaan atas Penilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2017-2018 pada Mahkamah Agung dan instansi terkait lainnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan

No.	Nama	Jabatan	Jangka Waktu Pemeriksaan
1.	Blucer W. Rajagukguk	Penanggung Jawab	3 hari
2.	Hery Ridwan	Wakil Penanggung Jawab	5 hari
3.	Ketut Arya	Pengendali Teknis	15 hari
4.	Christanto Hery Wibowo	Ketua Tim	40 hari
5.	Alexander	Ketua Sub Tim	40 hari
6.	Leony Hendrawan Wibowo	Anggota Tim	40 hari
7.	Indri Gatari Mauludin	Anggota Tim	40 hari
8.	Yusuf Agil Pamungkas	Anggota Tim	40 hari
9.	Reto Aditya	Anggota Tim	40 hari
10.	Bonny Eka Putra	Anggota Tim	40 hari
11.	Muhammad Fadly	Anggota Tim	40 hari

Jakarta, 12 Oktober 2018
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Ketua

MOERMAHADI SOERJA DJANEGARA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Jalan Gatot Subroto Nomor 31, Jakarta Pusat 10210, Telepon 021-25549000 Ekstensi 3562 Faksimile 021-5700501

Jakarta, 17 Oktober 2018

Nomor : 01/REVAL-MA/10/2018
Lampiran : Satu berkas
Hal : Permintaan Dokumen Awal

Yth.
Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung
di Jakarta

Sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan atas Penilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2017-2018 pada Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang, Kementerian/Lembaga selaku Pengguna Barang, dan Instansi terkait lainnya di Jakarta dan daerah sesuai Surat Tugas Nomor 93/ST/I-IV/10/2018 tanggal 12 Oktober 2018, kami memerlukan dokumen-dokumen (**terlampir**) sebagai bagian dari proses pemeriksaan yang kami lakukan. Dokumen lainnya yang belum tercantum dalam lampiran surat ini akan kami mintakan kemudian dalam pelaksanaan pemeriksaan.

Kami harapkan dokumen tersebut dapat disampaikan kepada kami pada kesempatan pertama atau paling lambat hari Jumat, tanggal 19 Oktober 2018.

Atas bantuan dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Ketua Tim,

Christanto Hery Wibowo
NIP 198512092007011002

Tembusan Yth.:
1. Penanggung Jawab
2. Wakil Penanggung Jawab
3. Pengendali Teknis

Lampiran Surat Nomor 01/REVAL-MA/10/2018

DAFTAR PERMINTAAN DOKUMEN

1. Kertas kerja inventarisasi
2. Laporan hasil inventarisasi yang terdiri dari:
   a. Rekapitulasi hasil inventarisasi
   b. Daftar barang hasil inventarisasi barang baik
   c. Daftar barang hasil inventarisasi barang rusak ringan
   d. Daftar barang hasil inventarisasi barang rusak berat
   e. Daftar barang hasil inventarisasi barang berlebih
   f. Daftar barang hasil inventarisasi barang tidak ditemukan
   g. Daftar barang hasil inventarisasi barang dalam sengketa
   h. Catatan hasil inventarisasi
   i. Surat keterangan dari Kuasa Pengguna Barang (KPB) atau pejabat yang ditunjuk mengenai kebenaran inventarisasi
3. Surat penyampaian LHI dari pimpinan satker kepada KPKNL
4. Data pendukung LHI seperti KIB, Formulir Pendataan, IMB untuk gedung dan bangunan, sertifikat untuk tanah (atau bentuk dokumen kepemilikan lainnya yang sah) untuk NUP yang disampling
5. Berita Acara Rekonsiliasi Hasil IP dengan KPKNL
6. *Back up data* SIMAK BMN (sampai dengan data terakhir)

DAFTAR SATKER SAMPEL PEMERIKSAAN PENILAIAN KEMBALI BMN

A	**JAKARTA**
1	BUA
2	Ditjen Badilmiltun
3	Ditjen Badilum
4	PA Jakarta Selatan
5	PA Jakarta Barat
6	PA Jakarta Pusat
7	PA Jakarta Utara
8	PA Jakarta Timur
9	PN Jakarta Barat
10	PN Jakarta Pusat
11	PN Jakarta Selatan
12	PN Jakarta Timur
13	PN Jakarta Utara
14	PT TUN Jakarta
15	PTA DKI Jakarta
16	PT DKI Jakarta
17	PTUN Jakarta
18	Dilmil Jakarta
19	Dilmilti Jakarta
20	Dilmiltama Jakarta
21	Kepaniteraan

B	**JAWA TENGAH**
1	PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
2	PENGADILAN NEGERI MAGELANG
3	PENGADILAN AGAMA DEMAK
4	PENGADILAN AGAMA KELAS I-A SEMARANG
5	PENGADILAN AGAMA KUDUS
6	PENGADILAN AGAMA PATI
7	PENGADILAN AGAMA PURWODADI
8	PENGADILAN AGAMA SALATIGA
9	PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG
10	PENGADILAN NEGERI DEMAK
11	PENGADILAN NEGERI KUDUS
12	PENGADILAN NEGERI PATI
13	PENGADILAN NEGERI PURWODADI
14	PENGADILAN NEGERI SALATIGA
15	PENGADILAN NEGERI SEMARANG
16	PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG
17	PENGADILAN NEGERI UNGARAN
18	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG
19	PENGADILAN AGAMA AMBARAWA
20	PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG
21	PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
22	PENGADILAN NEGERI SURAKARTA
23	PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO

24 PENGADILAN AGAMA BOYOLALI
25 PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR
26 PENGADILAN AGAMA SURAKARTA
27 PENGADILAN NEGERI BOYOLALI
28 PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR
29 PENGADILAN NEGERI KLATEN
30 PENGADILAN AGAMA KLATEN
31 PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

C JAWA TIMUR

1 PENGADILAN NEGERI SURABAYA
2 PENGADILAN TINGGI SURABAYA
3 PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
4 PA GRESIK
5 PENGADILAN AGAMA SURABAYA
6 PENGADILAN AGAMA TUBAN
7 PENGADILAN NEGERI TUBAN
8 PENGADILAN TINGGI TUN SURABAYA
9 PN GRESIK 01
10 PN LAMONGAN
11 PA LAMONGAN

D SULAWESI SELATAN

1 PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
2 PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
3 PENGADILAN TINGGI TUN MAKASSAR
4 PENGADILAN AGAMA PANGKAJENE
5 PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA
6 PENGADILAN NEGERI MAROS
7 PENGADILAN NEGERI PANGKAJENE
8 PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA
9 PENGADILAN NEGERI TAKALAR
10 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR
11 PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR
12 PENGADILAN AGAMA SELAYAR
13 PENGADILAN NEGERI SELAYAR
14 PENGADILAN AGAMA MAROS
15 PENGADILAN AGAMA JENEPONTO
16 PENGADILAN NEGERI JENEPONTO
17 PENGADILAN AGAMA TAKALAR
18 PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR
19 UAKPB PENGADILAN AGAMA MAKASSAR

E JAWA BARAT

1 PENGADILAN NEGERI BOGOR
2 PENGADILAN NEGERI CIBINONG
3 BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL MA RI
4 PENGADILAN AGAMA BOGOR
5 PENGADILAN AGAMA CIBADAK

F KALIMANTAN BARAT

1 PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
2 PTUN PONTIANAK
3 PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK (01)
4 PENGADILAN NEGERI NGABANG
5 PENGADILAN NEGERI PONTIANAK
6 PTA. PONTIANAK
7 PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH
8 PENGADILAN AGAMA PONTIANAK
9 PENGADILAN AGAMA SINTANG
10 PENGADILAN NEGERI MEMPAWAH
11 PENGADILAN NEGERI SINTANG

Jadwal Pemeriksaan atas Penilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2017-2018 pada Mahkamah Agung dan instansi terkait lainnya di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan Kalimantan Barat

| No | Nama | Peran | Bln | Oktober | | |